

**STRATEGI PEMERINTAH DESA PADA PEMBINAAN MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DESA**

(Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI



Disusun oleh :

Wilibrodus Suri

2018210079

**KOMPETENSI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

**STRATEGI PEMERINTAH DESA PADA PEMBINAAN MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DESA PENDEM KECAMATAN JUNREJO
KOTA BATU**

Wilbrodus Suri

Willy Tri Hardianto, Dewi Citra Larasati

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Jalan Telaga Warna, Tlogomas, Malang, -65144, Telp. (0341) 565500

Abstrak

Inisiatif utama pemerintah daerah adalah membangun desa, khususnya untuk mencapai kesenjangan masyarakat secara keseluruhan. Di Desa Pandem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, pemerintah desa secara konsisten memberikan inspirasi dan konsep segar untuk membangun kembali rasa percaya diri masyarakat dan melibatkan mereka secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk (a) menggambarkan dan mengkaji teknik pemerintah kota dalam memberdayakan perbaikan kawasan di Desa Pandem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dan (b) membedakan dan membedah faktor-faktor yang membantu dan merusak sistem ini. Penelitian ini menggunakan strategi subjektif. Rapat, persepsi, dan dokumentasi merupakan sebagian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Teknik analisis datanya adalah triangulasi data. Untuk menilai validitas data, proses triangulasi kepercayaan digunakan untuk memberikan hasil. Berdasarkan prosedur yang ada, pendekatan ini telah dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan tertentu, dan kemajuannya semakin cepat setiap tahunnya. Masyarakat secara keseluruhan dapat melihat peningkatan kegiatan yang menarik dan produktif, pencapaian tujuan dan target, serta kemajuan perbaikan kota sebagai hasilnya, yang semuanya berdampak positif dan dapat ditegakkan oleh masyarakat setempat.

Kata kunci : Strategi, Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota dan Pedoman Penyelenggaraannya, khususnya Undang-undang Tidak Resmi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tahun 2014 tentang Kota, mengarahkan kehadiran kota di Indonesia. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kota adalah suatu kesatuan wilayah setempat yang sah yang mempunyai batas-batas geologis yang senantiasa mengarahkan wilayah setempat di dekatnya sesuai dengan adat istiadat kewilayahan yang dianut dalam kerangka pemerintahan Indonesia. Kota-kota diawasi berdasarkan pedoman desentralisasi dan diarahkan oleh pemerintah daerah. Sesuai Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota dan Pedoman Penyelenggaraannya, khususnya Undang-undang Tidak Resmi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan kota adalah kota dan adat istiadat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut kota, adalah suatu kesatuan wilayah setempat yang sah yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai kedudukan untuk menentukan serta melaksanakan peraturan, adat istiadat, dan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Pemerintahan Daerah RI Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan melalui pembangunan desa. Pembangunan adalah proses multifaset yang melibatkan perubahan struktur sosial, sikap lokal, institusi nasional, dan meningkatkan pembangunan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Siagian (2018:4) mengartikan pembangunan sebagai “suatu perkembangan upaya untuk mengakui pembangunan dan perubahan yang terencana dan sadar yang dilakukan oleh suatu negara menuju kemajuan dalam pembangunan negara (nationbuilding)”. Upaya pemerintah yang harus dilakukan kadang-kadang disebut sebagai “upaya pembangunan” karena tujuan mendasar pemerintah adalah merancang kebijakan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dapat dibagi menjadi dua kategori: pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik mengacu pada perubahan yang dapat

dilihat atau dirasakan langsung oleh masyarakat (Kuncoro 2017:20). Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum merupakan dua contoh pembangunan fisik. Sedangkan pembangunan nonfisik merupakan pertumbuhan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan terinspirasi oleh masyarakat lokal (Wresniwiro, 2018). Contoh pembangunan non-fisik adalah meningkatkan kesehatan masyarakat lokal dan perekonomian penduduk desa.

Komunitas desa yang terbuka untuk menerima inisiatif reformasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka dikatakan berada dalam tahap perkembangan komunitasnya. Hingga saat ini, setiap pemerintah daerah telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah federal. Dan setiap proyek mempunyai kualitas yang unik di setiap desa. Selain kurangnya sumber daya, kurangnya profesional yang dapat memimpin mereka menuju pembaharuan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingkat heterogenitas (kualitas masyarakat) yang relatif tinggi di antara masyarakat desa, maka pengembangan masyarakat desa merupakan sebuah hal yang wajar. tugas yang menantang.

Seseorang yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari suatu kelompok, dikatakan berpartisipasi. Pemerintah desa harus terlebih dahulu mengangkat persoalan kerjasama kawasan lokal sedang dikembangkan karena merupakan salah satu tahapan dalam proses perbaikan kota. Dengan mengikutsertakan pemerintah kota, hampir pasti masyarakat setempat akan merasa diberi kesempatan atau peluang yang luar biasa untuk turut serta dalam pembangunan. Partisipasi dalam beberapa keadaan dapat dipandang sebagai keterlibatan sadar seseorang dalam interaksi sosial, menurut Andriani (2018: 111).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau partisipasi individu dalam masyarakat pada proses interaksi sosial, mengenali persoalan-persoalan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di mata publik dalam keadaan tertentu, serta dalam sekadar memutuskan (jawaban atas) mengelola persoalan, melakukan upaya-upaya. untuk mengatasi permasalahan, dan cara paling umum untuk melibatkan daerah setempat dalam mensurvei perubahan yang terjadi. 2019 (Ahmad Mustanir dkk.). Masyarakat desa kini lebih mampu menjadi fokus pembangunan sesuai

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mengatur proyek, gerakan, dan keterlibatannya sendiri dalam rangka membangun sumber daya dan potensinya sendiri untuk kesejahteraan kolektif. Selain itu, UU No. 6 Tahun 2014 telah memasukkan keterlibatan masyarakat yang beragam dalam ketentuannya sebagai bentuk pengakuan kedaulatan desa, mengingat partisipasi masyarakat sebelumnya belum banyak dimasukkan dalam undang-undang yang mengatur desa.

Menurut Hajar S. Tanjung (2018: 12), keterlibatan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori berbeda, termasuk kontribusi yang dilakukan melalui pemikiran, pertukaran ide, dan berbagi keahlian ilmiah pada pertemuan atau konferensi. Lalu ada keterlibatan anggota staf dalam upaya pengembangan atau perbaikan masyarakat, bantuan dari pihak lain, dan sebagainya. Penyertaan harta benda yang disumbangkan oleh perorangan dalam berbagai kegiatan untuk pertumbuhan atau kemajuan masyarakat, bantuan orang lain, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, kontribusi kemampuan dan pengetahuan manusia untuk mendorong berbagai bentuk usaha dan industri.

Berhubungan dengan partisipasi nilai yang menjadi persoalan di desa pendem, seperti yang diutarakan oleh Sekretaris Desa Pendem bahwa yang menjadi persoalan dasar pembangunan di Desa Pendem yaitu kurangnya partisipasi masyarakat pada membangun di desa. Disini dapat dilihat dan diketahui bahwa pemerintah desa sangat membutuhkan campur tangan dari masyarakat untuk membangun wilayah desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian untuk melaksanakan riset berjudul **“Strategi Pemerintah Desa Pada Pembinaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Pendem.”**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan berlatar belakang di atas sehingga riset bisa dirumuskan:

1. Bagaimana strategi pemerintah desa pada pembinaan masyarakat pada membangun ?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat strategi pemerintah desa pada pembinaan masyarakat dalam pembangunan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahan yang ada, maka tujuannya yang ingin tercapai pada riset berikut :

1. Untuk deskripsikan dan analisis strategi pemerintah desa pada pembinaan masyarakat pada membangun.
2. Untuk identifikasi dan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pemerintah desa pada pembinaan masyarakat pada membangun

1.4. Manfaat Penelitian

Keunggulan riset bisa dipecah menjadikan dua kategori: keunggulan teoretis dan keunggulan aktual:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diyakini dapat memberikan manfaat praktis dan informatif, terutama dalam menawarkan inisiatif pemerintah yang dapat menjadi sumber inspirasi keterlibatan pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk menciptakan teori-teori yang mengeksplorasi inisiatif pemerintah desa untuk mendorong pengembangan masyarakat.

2. Manfaat praktis

Dari sudut pandang praktis, riset dilaksanakan dengan harapan bisa berikan perspektif baru kepada para mahasiswa inisiatif pembangunan desa, dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan pecahan upaya atau usaha dan cara membangun Desa. Hal menarik yang mau diteliti di sini adalah:

- a. Bagi peneliti menambah wawasan atau pengetahuan untuk memahami dan mengaktualkan strategi nyata dalam pembinaan pembangunan wilayah Desa Pendem, Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- b. Bagi masyarakat desa untuk turut berpartisipasi dalam membangun wilayah Desanya, berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dalam memberikan kontribusi secara khusus tentang strategi yang perlu dalam mendorong partisipasi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Mira. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaraharja Kota Banjar*. Jurnal Academia Praja. Vol 2 No.1.
- Davis, Keith. 2011. *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Gustiman. 2021. Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Journal Universitas Islam Kuantan Singingi*, Nomor 1 (halaman 913-934). Riau: Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Ginting, Bendralmi Oktaviani. 2020. Tinjauan Yuridis Tentang Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Pihak Ketiga di Desa Jeraya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo. *Skripsi*. Universitas Quality. (Diakses Pada 15 Agustus 2022 pukul 10.00).
- Hajar, Syari Irwan. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir. Medan*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Holiq, Tesha Tenriola. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung “Water Secure World For All” World Bank (Studi Kasus: Pelaksanaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III di Desa Baroko Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan Tahun 2018-2021). Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang (Diakses pada 20 Agustus 2022 Pukul 11.00).
- Hutapea. 2017. *Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015*. Jurnal Organisasi Manajemen. Volume 4 No. 1
- Kusnaeni, Indria Septian. 2014. Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. *Thesis*. Universitas Pendidikan Indonesia (Diakses pada 21 Agustus 2022 pukul 12.45)
- Kuncoro. 2017. *Pembangunan Pengawasan Infrastruktur Fisik dan Non Fisik*, Jakarta: Erlangga.
- Kasman dan Adiwidjaja. 2019. *Strategi Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Torongrejo Kota Batu*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 8, Nomor 2 (Halaman 88-92). Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.
- Lailiani. 2017 *Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, (Halaman 790-798). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mustanir, Ahmad. 2019. *Peranan Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*. JCG: Jurnal Clean Government, 2019, 2.1: 67-84
- Nurcholis, Hanif. 2014. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-undang Desa.

Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

Purnomo. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. *Skripsi*. Universitas Yogyakarta. Tidak diterbitkan

Rangkuti, Freddy. 2017. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Mea dan Sedi. 2021. Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada. *Journals' Home of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol 11, Nomor 1 (Halaman 37-52)*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Mengartikan Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wresniwiro. 2018 .*Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.